



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
JL. JENDERAL AHMAD YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR  
JAKARTA PUSAT

Nomor : 1172/DJU/KP04.1/12/2018 Jakarta, 20 Desember 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Perihal : Proses Kenaikan Pangkat Periode  
1 April 2019

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi  
di-  
Tempat.

Berkaitan dengan masih banyaknya Pengadilan Tinggi yang tidak mengirimkan Rencana Kenaikan Pangkat (RKP) dan keterlambatan pengiriman berkas usul Kenaikan Pangkat Non KPO, bersama ini kami minta untuk memperlancar proses Kenaikan Pangkat periode 1 April 2019 agar :

1. Setiap Pengadilan Tinggi mengirimkan Rencana Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan (Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah satuan kerjanya paling lambat tanggal 26 Desember 2018 dalam bentuk file excel melalui email :
  - tanashakimbadilum@yahoo.co.id untuk hakim
  - subdit\_mutasipanitera@yahoo.co.id untuk tenaga teknis kepaniteraan (Form Rencana Kenaikan Pangkat terlampir)
2. Mengirimkan usul dan berkas persyaratan kenaikan pangkat non KPO (Penyesuaian Ijazah dan Struktural) secara lengkap ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 15 Januari 2019. (Persyaratan terlampir)
3. Bagi tenaga teknis yang telah menyelesaikan pendidikannya dan akan mencantumkan gelar pendidikan terakhirnya dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkatnya agar segera mengusulkan pencantuman gelar terlebih dahulu sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya.
4. Setiap Pengadilan Tinggi diwajibkan untuk mengecek kembali masa kerja golongan yang terdapat pada usul kenaikan pangkat otomatis (KPO) di Aplikasi SIKEP.
5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak akan memproses berkas usul Kenaikan Pangkat Non KPO yang diterima melewati batas waktu yang telah ditentukan diatas.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



**DIREKTUR JENDERAL**  
**Badan Peradilan Umum,**

**HERRI SWANTORO**

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;

### **BERKAS PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT IV/c KE ATAS**

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir
2. SK CPNS
3. SK Jabatan terakhir
4. Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan terakhir
5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan terakhir
6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dalam Jabatan terakhir
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D.P.3) 2 (dua) tahun terakhir
8. Kartu Pegawai (Karpeg)
9. DRH (Daftar Riwayat Hidup)
10. DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan)

### **BERKAS PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL**

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir
2. SK CPNS
3. SK Jabatan terakhir
4. Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan terakhir
5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan terakhir
6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dalam Jabatan terakhir
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D.P.3) 2 (dua) tahun terakhir
8. Kartu Pegawai (Karpeg)
9. STLUD (Untuk Kenaikan Pangkat II/d ke III/a dan III/d ke IV/a)

### **BERKAS PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir
2. SK CPNS
3. Ijazah S-1/S-2 yang dilegalisir oleh :  
**Universitas / Institut :**  
Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik  
**Sekolah Tinggi :**  
Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik
4. SK Jabatan terakhir
5. Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan terakhir
6. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan terakhir
7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dalam Jabatan terakhir
8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D.P.3) 2 (dua) tahun terakhir
9. Kartu Pegawai (Karpeg)
10. STLUPI (Untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)

